



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Nomor : 100/17/NK/PEM/2022
Nomor : 58/ORI-MOU/XI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. ARIFIN ARPAN** : Bupati Tapin, berkedudukan di Jalan Datu Nuraya RT.01 Kelurahan Randa Malingkung Kawasan Rantau Baru Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kode Pos 71114, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan nota kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAH KESATU**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAH KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAH KESATU**;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAH**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAH KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
- d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAH KEDUA**;
- e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik; dan

g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dari pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan dalam rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (1) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini, serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Pemerintah Kabupaten Tapin

Up. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tapin

Alamat : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

Jalan Datu Nuraya RT.01 Kawasan Rantau Baru

Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin

Utara Kabupaten Tapin

Email : bagor_tapin@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin

Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375

Website : www.ombudsman.go.id

Email : kalsel@ombudsman.go.id

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan disepakati dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 16

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN NOTA KESIMPULAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 100/17/NK/PEM/2022

NOMOR : 58/ORI-MOU/XI/2022

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

RENCANA KERJA

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/ UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	2022	2023	2024	PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
							Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/ UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Menyeleenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/ UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

DINAS PENDIDIKAN

2.	Program Penataan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah pelayanan inovasi publik	☐	☐	☐	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	2022	2023	2024	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah pelayanan inovasi publik	☐	☐	☐	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	☐	☐	PIHAK KEDUA	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
				☐	☐	☐		Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin
				☐	☐	☐		Kabupaten Tapin

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Daerah/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022 2023 2024	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah pelayanan publik inovasi	2022 2023 2024	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin
					Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terseleenggaranya penilaian kegiatan	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terseleenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah inovasi pelayanan publik	2022	2023	2024	PIHAK KEDUA	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Terseleenggaranya penilaian kegiatan standar pelayanan publik daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	Jumlah Perangkat	2022	2023	2024	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terseleenggaranya Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	☐	☐	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

PIHAK KESATU,

M. ARIPTIN ARPAN

PIHAK KEDUA,

MOKHAMMAD NAJIH